

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, DAN PENGENDALIAN
PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA
KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2017-2022**



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat *Allah SWT*, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Tahun 2017-2022 dapat selesai dikerjakan.

Rencana Strategis ini disusun sebagai pedoman untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan untuk mencapai Visi dan Misi dalam rangka memberikan pelayanan dan pembinaan terbaik bagi masyarakat Kota Payakumbuh dalam kurun waktu 2017-2022 . Penyusunan Rencana Strategis ini disusun oleh Tim yang terdiri unsur pimpinan dan staf di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dengan menggunakan data indikator yang mengacu pada RPJMD Kota Payakumbuh.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis ini mungkin masih terdapat kekeliruan atau kekurangan, untuk itu masukan yang membangun demi perbaikan RENSTRA ini untuk masa yang akan datang sangat diharapkan.

Demikianlah Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Kota Payakumbuh dibuat untuk dapat jadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan sampai Tahun 2022. Semoga bermanfaat untuk peningkatan kinerja Pemerintah Kota Payakumbuh di masa datang.

Payakumbuh, 23 April 2018

**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
Dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana**



Drs. SYAHNADEL KHAIRI

NIP. 19610903 198703 1 003

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DP3AP2KB KOTA PAYAKUMBUH	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana	11
2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana	15
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana	19

	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana	25
BAB III	ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana	28
	3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	30
	3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Povinsi	35
	3.4 Telaahan RTRW dan KLHS	38
	3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	39
BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
	4.1 Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana	42
	4.2 Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana	42
	4.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana	43
	4.4 Cross Cutting	46
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	52
	5.1 Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana	52
	5.2 Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana	53

BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	55
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	60
BAB VIII	PENUTUP	62

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana	16
Tabel 2.2	Sarana/ Fasilitas Fisik Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana	17
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana	22
Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana	24
Tabel 3.1	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	32
Tabel 3.2	Bobot Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis	39
Tabel 3.3	Tabel Skoring dalam Penentuan Isu-Isu Strategis	40
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana	45
Tabel 4.2	Crosscutting Indikator Kota dengan Perangkat Daerah	46
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	54
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh	56
Tabel 7.1	Indikator Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana yang mengacu pada tujuan sasaran RPJMD	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi DP3A&P2KB Kota Payakumbuh	14
-----------------	--	-----------

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK IKU

Lampiran 2 Pohon Kinerja

**Lampiran 3 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota
Payakumbuh**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Seiring dengan perkembangan pembangunan nasional, Program Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana mengalami perkembangan yang pesat. Dengan ruang lingkup dan dimensi yang semakin luas serta semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi menuntut upaya pengerahan potensi yang ada, baik berupa daya, dana, sarana, maupun kemampuan manajemen yang dapat mengarahkan segala sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan program secara efektif dan efisien.

Untuk menjawab tantangan tersebut diatas, masalah yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan adalah masalah pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk keluarga berencana. Masalah tersebut diatas dengan berbagai karakteristiknya merupakan variabel-variabel yang mempunyai pengaruh yang sangat luas pada segala aspek kehidupan. Pada hakekatnya pembangunan di urusan-urusan tersebut tersebut diatas adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Oleh karena itu pemahaman terhadap kondisi kependudukan adalah merupakan hal yang penting dalam perencanaan pembangunan. Karena hal tersebut dapat dipakai untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan, khususnya mengenai kesejahteraan masyarakat.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Kota Payakumbuh merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Daerah dan menjadi pilar utama pelayanan masyarakat di Kota Payakumbuh. Dokumen ini berisikan jabaran lebih kongkrit dan operasional dalam bentuk strategi, kebijakan, dan program pembangunan sesuai dengan potensi serta permasalahan yang mempengaruhi perkembangan pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk keluarga berencana khususnya di Kota Payakumbuh. Penyesuaian Dokumen

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) ini juga mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 dan mengacu pada RPJP Kota Payakumbuh 2005 – 2025.

Rencana strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana merupakan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Dokumen Rencana Strategis ini akan dijadikan sebagai acuan dan pedoman bagi aparat pengelola dan aparat pelaksana kebijakan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Kota Payakumbuh dalam peningkatan pelayanan DP3AP2KB di Kota Payakumbuh dan sebagai tolak ukur kinerja pembangunan dengan dua urusan wajib.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana sesuai Peraturan yang ada menjalani 2 (dua) urusan wajib pemerintah yang akan dilaksanakan untuk kurun waktu tahun 2017-2022 sebagai berikut :

1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dalam rangka Penyusunan Rencana Strategis DP3AP2KB 2017-2022 kami telah mencoba memperhatikan semua permasalahan yang meliputi pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk keluarga berencana yang berpotensi mempengaruhi pelaksanaan dari kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. Oleh karena itu, perlu dilaksanakan penyesuaian Rencana Strategis dalam bentuk penyempurnaan kegiatan berdasarkan

pemahaman terhadap kondisi pemberdayaan perempuan dan KB yang dinamis dan disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh dalam mengakomodir Program/Kegiatan yang bersifat Nasional. Selain itu Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana tahun 2017-2022 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana wajib berpedoman pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana memiliki hubungan keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi, dan dengan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Peraturan Kepala Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, RPJMD Provinsi/ Kabupaten/ Kota, dan memperhatikan Renstra Kementerian/ Lembaga, Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/ Kabupaten/

Kota, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi/ Kabupaten/ Kota.

1.2 LANDASAN HUKUM

Adapun landasan hukum Penyusunan Renstra DP3AP2KB Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
6. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
7. Undang – Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender;
11. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014-2019
13. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1997 tentang Program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah;

14. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG);
15. Inpres Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengarusutaman Gender Dalam Pembangunan Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Pokja Pembinaan Posyandu;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
19. Surat Edaran Mendagri Nomor 411.3/116/SJ/2001 tentang Revitalisasi Posyandu;
20. Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2005 yang dikukuhkan dengan Perda Nomor 4 Tahun 2005 yang menegaskan bahwa program KB Nasional merupakan bagian dari pembangunan Kualitas Manusia dan Bagian dari Program Pengentasan Kemiskinan;
21. Renstra Program KB Nasional Tahun 2010-2014 dan Tahun 2015-2019;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015;
23. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;
25. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga;
26. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
27. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh

28. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana.
29. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 84 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022.
30. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan rencana strategis merupakan Pedoman kegiatan DP3AP2KB dalam jangka waktu menengah 5 (lima) tahun kedepan agar tetap fokus terhadap pencapaian Visi dan Misi DP3AP2KB. Dengan adanya Rencana Strategis diharapkan seluruh kegiatan DP3AP2KB dapat berjalan secara bertahap berdasarkan Skala Prioritas serta berkesinambungan.

1.3.1 Maksud

Maksud Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Payakumbuh tahun 2012- 2017 sebagai berikut :

1. Menyiapkan kerangka perencanaan dalam upaya menetapkan strategi dalam mewujudkan Visi dan Misi DP3AP2KB Kota Payakumbuh.
2. Sebagai Pedoman Dalam merumuskan Rencana Kerja (Renja) Tahunan.
3. Sebagai Acuan dalam mengukur pencapaian Kinerja DP3AP2KB Kota Payakumbuh.
4. Menyediakan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk

Keluarga Berencana sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

1.3.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai landasan operasional serta arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu limadalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pada DP3AP2KB Kota Payakumbuh .
2. Memberikan arah dalam pencapaian kinerja serta dapat mengetahui sejauh mana Renstra ini dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien .
3. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana baik tahunan,sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan , terutama dalam penyusunan laporan kinerja unit pelaksana yang menuju kepada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
4. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.
5. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana yang merupakan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2017-2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana (DP3AP2KB) ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L
- 3.4 Telaahan RTRW dan KLHS
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN

- 4.1 Visi Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 Strategi
- 5.2 Arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN
PENDUDUK KELUARGA BERENCANA

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, DAN
PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana ini berasal dari OPD Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMP&KB) yang berubah menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana (DP3AP2KB) berdasarkan dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, sehingga terjadi perubahan nomenklatur dan perubahan kewenangan dalam melaksanakan urusan pemerintah.

Urusan Wajib Pemerintahan Pemberdayaan Masyarakat yang sebelumnya menjadi salah satu urusan wajib BPMP&KB, tidak lagi menjadi urusan yang dilayani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana (DP3AP2KB).

Urusan wajib pemerintahan yang dilaksanakan oleh DP3AP2KB saat ini adalah:

1. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan 6 (enam) sub urusan yaitu :
 - 1.1. Kualitas Hidup Perempuan
 - 1.2. Perlindungan Perempuan
 - 1.3. Kualitas Keluarga
 - 1.4. Data Gender dan Anak

- 1.5. Pemenuhan Hak Anak (PHA)
- 1.6. Perlindungan Khusus Anak
2. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan 3 (tiga) sub urusan, yaitu :
 - 2.1. Pengendalian Penduduk
 - 2.2. Keluarga Berencana
 - 2.3. Keluarga Sejahtera

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan pelayanan dan pembinaan terhadap Forum Anak Kota Payakumbuh dan penguatan kelembagaan Payakumbuh Kota Layak Anak, Kegiatan Gerakan Sayang Ibu (GSI) dan Kecamatan Sayang Ibu (KSI), Pembinaan pada organisasi-organisasi wanita dan pelayanan terhadap pengaduan masyarakat pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Pelayanan pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yakni Pelayanan Kontrasepsi, pembinaan terhadap kader-kader KB (Pos KB dan Sub-Pos KB), pembinaan terhadap kelompok Bina Keluarga Balita, kelompok Bina Keluarga Remaja, kelompok Bina Keluarga Lansia, Bina Lingkungan Keluarga Pembinaan terhadap kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), pembinaan terhadap kelompok Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-Remaja), Pemberian operasional bagi petugas klinik KB dan Kader KB di lapangan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh, dan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana (DP3AP2KB), maka DP3AP2KB adalah unsur pendukung penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Kota meliputi berbagai aspek kehidupan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk keluarga berencana.

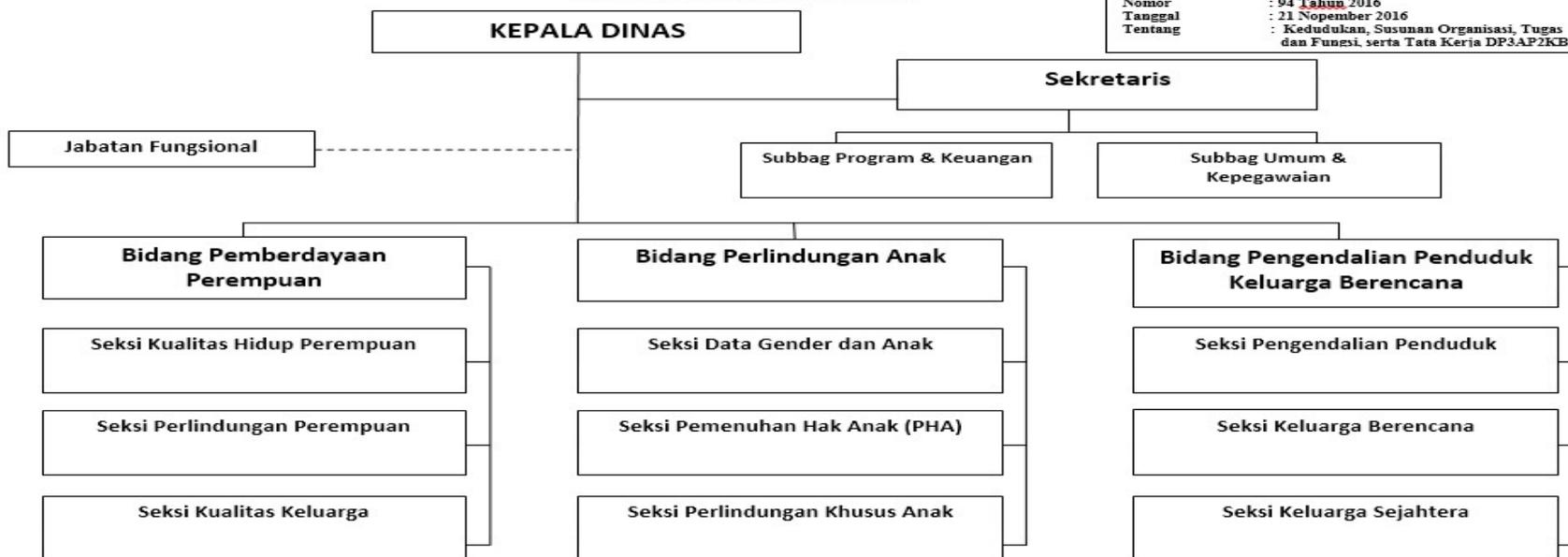
Tugas Pokok dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana adalah membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk keluarga berencana.

Sedangkan fungsi, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk keluarga berencana.
- b. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk keluarga berencana.
- c. Pelaksanaan norma, standar, prosedur serta kriteria di bidang Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk keluarga berencana.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
KOTA PAYAKUMBUH**

Dasar Hukum SOTK : Perwako Payakumbuh
 Nomor : 94 Tahun 2016
 Tanggal : 21 Nopember 2016
 Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja DP3AP2KB



Gambar 1

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

2.2 SUMBER DAYA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana didukung oleh sumber daya yang terdiri dari Sumber Daya Manusia, dan sumber daya fasilitas. Untuk Sumber Daya Manusia, kinerja DP3AP2KB kondisi 1 Januari 2017 dengan personil sebanyak 50 Orang yang terdiri dari 16 Orang Pejabat Struktural dan 12 Orang Fungsional Khusus (Penyuluh Keluarga Berencana), Fungsional Umum sebanyak 12 Orang Staf Fungsional Umum dan 10 Orang Tenaga Harian Lepas (THL), rincian PNS pada DP3AP2KB adalah sebagai berikut:

No.	NAMA JABATAN (SESUAI PERDA)	ESELON	JENIS KELAMIN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/PANGKAT				JUMLAH	
			L/P	ISI	KOSONG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	I	II	III		IV
1	Kepala Dinas	II.b	L	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
2	Sekretaris Dinas	III.a	L	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
3	Kabid Pemberdayaan Perempuan	III.b	P	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
4	Kabid Perlindungan Anak	III.b	P	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
5	Kabid Pengendalian Penduduk, Keluarga Sejahtera	III.b	P	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
6	Kasubag Umum dan Kepegawaian	IV.a	L	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1
7	Kasubag Program dan Keuangan	IV.a	P	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
8	Kasi Kualitas Hidup Perempuan	IV.a	P	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
9	Kasi Perlindungan Perempuan	IV.a	P	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1
10	Kasi Kualitas Keluarga	IV.a	P	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1
11	Kasi Data Gender dan Anak	IV.a	L	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
12	Kasi Pemenuhan Hak Anak (PHA)	IV.a	P	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
13	Kasi Perlindungan Khusus Anak	IV.a	P	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1
14	Kasi Pengendalian Penduduk	IV.a	L	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1
15	Kasi Keluarga Berencana	IV.a	L	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1
16	Kasi Keluarga Sejahtera	IV.a	L	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1
17	Fungsional Khusus (Penyuluh Keluarga Berencana)	-	L (3) / P (9)	12	-	-	-	2 (P)	-	-	3 (P)	-	7 (3L/4P)	-	-	-	-	6 (5P /1L)	6 (4P /2L)	12
18	Fungsional Umum (staf)	-	L (5) / P (7)	12	-	-	-	7(4L/3P)	-	-	2(P)	-	3(1L/2P)	0	-	-	9(4L/5 P)	3(1L/ 2P)	-	12
19	Honoror Tenaga Harian Lepas	-	L (3) / P (7)	10	-	-	-	8 (3L/5P)	-	-	1 (P)	-	1 (P)	-	-	-	-	-	-	10
J U M L A H					50	-	-	18	-	-	7	-	22	3	-	-	8	31	11	50

Tabel 2.1

Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

Sedangkan Sumber Daya Fasilitas adalah Sarana dan Prasarana DP3AP2KB yang merupakan Aset / Modal Usaha dan juga lembaga/ mitra kerja yang masih beroperasi terdiri dari :

a. Sarana Fisik

Sarana/ fasilitas fisik terdiri dari tanah, bangunan dan tiang papan iklan yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dengan rincian keadaan hingga akhir 2016 adalah :

Tabel 2.2

Sumber Daya Fisik Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

No.	Uraian	Luas	Nilai (Rp.)	Kondisi
1	Tanah Kantor di Tanjung Gadang	1.000 m ²	96.530.000	Baik
2	Tanah Kantor di Sawah Padang	812 m ²	178.990.000	Baik
3	Gedung kantor di Tanjung Gadang	378 m ²	757.497.000	Baik
4	Mushalla di Tanjung Gadang	25 m ²	36.000.000	Baik
5	Gedung Kantor PKK di Sawah Padang	180 m ²	354.380.000	Baik
6	Aula PKK di Sawah Padang	105 m ²	223.579.999	Baik
7	Rumah Dinas Penjaga di Sawah Padang	33 m ²	47.520.000	Baik
8	Gedung Posyandu di Parit Rantang	36 m ²	52.707.000	Baik
9	Gedung Posyandu di Labuh	36 m ²	52.707.000	Baik

	Basilang			
10	Gedung Posyandu di Balai Betung	36 m2	52.707.000	Baik
11	Gudang Alat Kontrasepsi di Kubu Gadang	42 m2	145.165.000	Baik
12	Balai Penyuluhan KB di Kec. Payakumbuh; Barat,Utara,Timur,Selatan,dan Latina	50 m2/Kecamatan	933.595.000	Baik
13	Tiang Baliho Iklan KB di Jalan Raya Kel. Balai Nan Duo	1 m2	39.825.000	Baik
14	Aula BPMP&KB	106 m2	166.812.000	Baik
J U M L A H			3.138.014.999	

b. Sarana/ Peralatan Kantor

Adalah sarana yang digunakan untuk keperluan perkantoran, berupa kendaraan dinas roda empat sebanyak 8 unit, kendaraan roda 2 sebanyak 43 unit, mebeuleir, komputer, pengeras suara, laptop dan berbagai peralatan/ perlengkapan untuk aktivitas perkantoran lainnya.

c. Alat-alat kedokteran

Alat-alat kedokteran ini berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana yang di distribusikan ke 38 klinik – klinik KB di Kota Payakumbuh. Alat-alat kedokteran tersebut adalah ; IUD Kit, Implant Kit, Obgyn Bed dan Implant Removal Kit.

d. Potensi /Mitra Kerja DP3AP2KB yang terdiri dari :

PKK, Posyandu, Tim Koordinasi PMT-AS, GOW, Dharmawanita Persatuan, Bundo Kandung, IKD, PKK Kecamatan (5 Kecamatan), BKB,

BKR, BKL, BLK, UUPKS, PIK-R/M, Kader KB, Pokja PUG, Forum Anak, P2WKSS, P2TP2A, GSI, Gugus Tugas KLA.

2.3 KINERJA PELAYANAN DP3A&P2KB KOTA PAYAKUMBUH

Kinerja pelayanan adalah implementasi kewajiban Instansi Pemerintah, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Kota Payakumbuh untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan misi unit kerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di awal tahun anggaran.

Gambaran mengenai pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pelayanan Keluarga Berencana

Pencapaian atas pelayanan KB dapat dilihat dari indikator utama yaitu Rasio Akseptor KB dan Rata-rata jumlah anak per-keluarga. Secara khusus, Rasio Akseptor KB dihitung dengan cara membandingkan antara jumlah Peserta KB aktif (PA) dibagi jumlah Pasangan Usia Subur (PUS). Rasio akseptor KB di tingkat Kota Payakumbuh berada pada angka yang cukup tinggi berkisar diatas 75%.

Selain rasio akseptor KB, indikator lain yang harus dicapai dalam Pelayanan Keluarga Berencana adalah Rata-Rata Jumlah Anak per-Keluarga. Indeks ini diperoleh dengan membandingkan jumlah Keluarga dibagi dengan jumlah jiwa yang berada di rentang usia 0-19 tahun. Angka-angka komponen tersebut diperoleh dari hasil Pendataan Keluarga Nasional yang dilaksanakan oleh Kader KB pada Bulan Juli s/d September setiap tahunnya.

Dari target nasional yang menginginkan target setiap keluarga mempunyai 2 orang anak (sesuai dengan slogan “2 anak cukup”) di Kota Payakumbuh ternyata berdasarkan hasil pendataan keluarga nasional setiap tahunnya rata-rata anak per-

keluarga masih berada di angka 2,78 orang anak atau dibulatkan menjadi 3 orang anak.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, indikator pendukung pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana adalah rasio KDRT, penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak serta kesertaan perempuan di lembaga legislatif. Untuk rasio KDRT hal yang diinginkan adalah terjadinya penurunan angka KDRT. Angka indeks ini didapat dengan membandingkan jumlah kasus KDRT yang dilaporkan baik ke Unit PPA Resor Kota Payakumbuh atau ke Kantor BPMP&KB dibagi dengan jumlah keluarga di Kota Payakumbuh dikali 1.000. Hasil pencapaiannya di Kota Payakumbuh, setiap tahun target KDRT diturunkan dan realisasinya tercapai. Hingga tahun 2016 rasio KDRT di Kota Payakumbuh turun menjadi 0,16 atau sebanyak 6 kasus. Kemudian indeks penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak didapat dengan membandingkan jumlah pengaduan KDRT dibagi dengan jumlah kasus yang diselesaikan baik itu diselesaikan oleh BPMP&KB maupun diselesaikan oleh Unit PPA atau yang berlanjut hingga pengadilan. Selanjutnya indeks persentase kesertaan perempuan di lembaga legislatif dihitung dengan membandingkan jumlah perempuan yang duduk di DPRD dibagi dengan jumlah anggota DPRD keseluruhan.

3. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pada urusan pemberdayaan masyarakat desa, pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana diukur dari indeks persentase keaktifan LPM, PKK dan Posyandu. Persentase tersebut dihitung dengan membandingkan jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), PKK dan Posyandu yang aktif dibagi dengan jumlah seluruh

LPM, PKK dan Posyandu yang ada. Pada ketiga lembaga kemasyarakatan tersebut, rata-rata semuanya sudah aktif 100%.

Gambaran mengenai anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada OPD lama dari DP3AP2KB, dalam hal ini adalah SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMP&KB) Kota Payakumbuh dalam kurun waktu 2013-2017 yang ditampilkan dalam tabel 2.2 dibawah, dapat dilihat bahwa rasio antara alokasi anggaran dan realisasi anggaran berada pada angka yang sangat baik yaitu diatas 90% setiap tahunnya selama periode 2012-2016. Hal-hal yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana ini antara lain ; prosedur/mechanisme yang sudah cukup baik; jumlah dan kualitas personil yang mulai memadai; dan percepatan progress pelaksanaan program.

Semua kegiatan yang telah dilaksanakan OPD DP3AP2KB dapat dilihat pada rangkuman kegiatan yang tertera pada tabel dibawah ini.

TABEL 2.3
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERIODE RENSTRA 2012-2017
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
BPMP&KB (DP3A&P2KB) KOTA PAYAKUMBUH

NO	INDIKATOR KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	TARGET RENSTRA OPD TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013 (8/3 x 100%)	2014 (9/4 x 100%)	2015 (10/5 x 100%)	2016 (11/6 x 100%)	2017 (12/7 x 100%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Rasio Akseptor KB				77%	76%	76%	76%	76%	77%	76%	76%	77%	76%	100%	100%	100%	101%	100%
2	Rata – rata jumlah anak per-keluarga				2,4	2,35	2,34	2,34	2,3	3,02	2,97	2,78	2,63	2,78	79%	79%	84%	89%	83%
3	Rasio KDRT				0,2	0,2	0,18	0,17	0,16	0,2	0,18	0,18	0,16	0,16	100%	90%	100%	94%	100%
4	Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak				70%	75%	100%	100%	100%	70%	75%	88%	92%	100%	100%	100%	88%	92%	100%
5	Persentase kesertaan perempuan dalam legislatif				15%	15%	15%	15%	15%	8%	8%	8%	8%	8%	53%	53%	53%	53%	53%
6	Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat aktif				100%	100%	100%	100%	100%	90%	100%	100%	100%	100%	90%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase posyandu aktif				100%	100%	100%	100%	100%	90%	90%	100%	100%	100%	90%	90%	100%	100%	100%
8	Persentase PKK aktif				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

9	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	60%							64%	78,61 %	69,92 %			106%	131.01 %	116.53 %		
10	Rata-rata jumlah anak per-keluarga	2,20							1.55	1.67	1.59			70.45%				

TABEL 2.4
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PERIODE RENSTRA 2012-2017
BPMP&KB (DP3A&P2KB) KOTA PAYAKUMBUH

No.	Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi anggaran pada tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran					Rata-rata pertumbuhan	
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016		
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
1	Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	207.479.350	956.598.522	332.858.050	1.059.861.290	699.252.090	191.509.350	863.059.606	307.485.928	987.752.564	683.441.325	92,30	90,22	92,38	93,20	97,74	651.209.860	606.649.755
2	Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	1.301.385.351	1.644.350.677	1.519.808.300	1.760.308.225	1.917.344.606	1.163.836.839	1.634.996.505	1.510.869.460	1.573.365.865	1.806.901.762	89,43	99,43	99,41	89,38	94,24	1.628.639.432	1.537.994.086
3	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1.549.575.750	1.903.080.222	2.010.679.678	4.191.853.565	4.813.290.682	1.482.858.941	1.774.095.512	1.936.995.114	4.092.327.310	4.757.280.336	95,69	93,22	96,34	97,63	98,84	2.893.695.979	2.808.711.443
	JUMLAH	3.058.440.451	4.504.029.421	3.863.346.028	7.012.023.080	7.429.887.378	2.838.205.130	4.272.151.623	3.755.350.502	6.653.445.739	7.247.623.423	92,80	94,85	97,20	94,89	97,55		

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA

2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- b. Belum semua Stakeholder memahami Konsep Pengarusutamaan Gender, sehingga Perencanaan dan Penganggaran yang responsif Gender belum terlaksana sepenuhnya.
- c. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- d. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.
- e. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
- f. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
- g. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.

- h. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.
- i. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- j. Masih sedikitnya partisipasi perempuan dalam pembangunan.
- k. Masih rendahnya kualitas perlindungan anak.
- l. Keterbatasan Tenaga Penyuluh (PLKB / PKB) untuk operasional di Lapangan.
- m. Masih minimnya dana operasional bagi kader Posyandu, Kader KB, Kader Bina Keluarga yang dianggarkan.
- n. Masih rendahnya partisipasi pria dalam penggunaan / pemakai kontrasepsi KB.
- o. Masih rendahnya minat generasi muda untuk mengikuti kegiatan bernuansa genre
- p. Masih lemahnya pemahaman, minat dan tanggung jawab dalam kelompok UPPKS mengenai ketahanan keuangan keluarga

2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
- b. Adanya lembaga masyarakat (PKK, P2TP2A, kader,dll) yang mendukung kinerja DP3AP2KB.

- c. Adanya *stakeholder* dan mitra kerja yang mendorong pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.
- d. Dengan adanya Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) yang diketuai oleh Kepala Bappeda merupakan peluang untuk menghadapi tantangan dalam Pengarusutamaan Gender. Hal ini dapat dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD).
- e. Adanya Program Nasional dan Provinsi cukup strategis yang diemban oleh DP3AP2KB Kota Payakumbuh.
- f. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
- g. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
- h. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DP3AP2KB

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA

Masalah - masalah dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana :

1. Masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Berdasarkan data kasus yang masuk ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), pada tahun 2017 tercatat jumlah laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 7 kasus, namun tidak tertutup kemungkinan terdapat kasus lainnya namun tidak disertai laporan atau pengaduan ke P2TP2A.
2. Masih rendahnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Masih rendahnya nilai IDG Kota Payakumbuh berdasarkan data BPS dalam Pembangunan manusia berbasis gender tahun 2016 adalah sebesar 61,70. Apabila dibandingkan dengan daerah lain atau kawasan lain masih berada pada nilai yang rendah. Hal ini berarti pemberdayaan perempuan dalam pembangunan masih belum optimal.
3. Masih kurangnya keberpihakan pembangunan terhadap anak. Keberpihakan pembangunan terhadap anak dapat dilihat dari masih rendahnya partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan, masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung Kota Layak Anak, hal ini juga dapat dilihat dari pemenuhan indikator indikator Kota Layak Anak yang

belum optimal. Dalam beberapa tahun terakhir pencapaian kategori Kota Layak Anak berada pada posisi pratama dalam beberapa periode berurutan yaitu pada tahun 2013, 2015, 2017, 2018. Fenomena ini dapat diartikan bahwa belum terdapat peningkatan yang signifikan terhadap pemenuhan indikator-indikator kota layak anak yang mencerminkan peningkatan terhadap pencapaian kategori Kota Layak Anak.

4. Belum optimalnya pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik. Pelaksanaan PUG belum dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan.
5. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sudah tinggi namun belum berada di kondisi ideal yang seharusnya 100% (seimbang antara IPM Laki-laki dengan IPM Perempuan). Data pembangunan manusia berbasis gender tahun 2016 dari BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2015 IPM laki laki tercatat 78,46, sedangkan IPM perempuan tercatat 77,30 yang berarti masih terjadi ketimpangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan terutama dari sisi pengeluaran per kapita disesuaikan.
6. Masih tingginya angka CPR (Contraceptive Prevalence Rate). Masih tingginya angka Contraceptive Prevalence Rate (CPR) sebesar 71,14 dibandingkan target CPR Perwakilan BKKBN Propinsi dan Nasional. Persentase modern Contraceptive Prevalence Rate (CPR) Perwakilan BKKBN Propinsi adalah sebesar 56,05 %.
7. Belum optimalnya cakupan pelayanan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga KKBPK. hal ini ditandai dengan belum optimalnya cakupan pelayanan bina keluarga balita (BKB) yang ber

KB. Pada kondisi saat ini pencapaian cakupan BKB yang ber KB baru mencapai 70 %.

3.2 TELAAHAN VISI , MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan , cita – cita yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai – nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen pemangku kebijakan /*stakeholders*.

Berdasarkan kondisi masyarakat Kota Payakumbuh saat ini permasalahan dan tantangan yang dihadapi dimasa depan , serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, maka dalam pelaksanaan pemerintah dalam pembangunan pada periode 2017 – 2022 , Kepala dan Wakil Kepala Daerah Terpilih mencanangkan Visi Pembangunan Kota Payakumbuh **“PAYAKUMBUH MAJU, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT, DENGAN SEMANGAT KEBERSAMAAN MENUJU PAYAKUMBUH MENANG”**

Dalam rangka pencapaian visi diatas, maka dirumuskan **5 (lima) misi pembangunan jangka menengah Kota Payakumbuh** dalam RPJMD adalah sebagai berikut :

- 1. Mewujudkan SDM yang handal, sehat dan kompetitif.**
- 2. Membangun perekonomian yang tangguh, unggul, berdaya saing dan berkeadilan dengan berbasis ekonomi kerakyatan dengan memunculkan gerakan ekonomi bersama.**
- 3. Meningkatkan penataan kota, ketersediaan infrastruktur dan fasilitas umum yang nyaman dan berkelanjutan.**

4. **Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.**
5. **Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya berdasarkan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah.**

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana DP3A&P2KB mendukung pencapaian misi kesatu yakni : **Mewujudkan SDM yang handal, sehat dan kompetitif.** Adapun salah satu sasaran yang akan dicapai dalam misi tersebut yang terkait dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana adalah **Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk** dengan strategi :

1. Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
2. Peningkatan kualitas pelayanan KB dan ketahanan keluarga.

Arah kebijakan untuk melaksanakan strategi dan sasaran diatas yakni :

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan hak anak.
2. Meningkatkan Penanganan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
3. Meningkatkan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan
4. Mewujudkan Payakumbuh Kota layak anak.
5. Meningkatkan kualitas layanan program keluarga berencana.
6. Menggerakkan dan memberdayakan seluruh masyarakat dalam program KB dan ketahanan keluarga.

Tabel 3.1
Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi
Dan Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah dalam RPJMD
2017-2022

No	Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi & Kebijakan RPJMD	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi: Mewujudkan SDM yang handal, sehat dan kompetitif	1) Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak	<ul style="list-style-type: none"> • Belum semua Stakeholder memahami Konsep Pengarusutamaan Gender, sehingga Perencanaan dan Penganggaran yang responsif Gender belum terlaksana sepenuhnya • Belum Optimalnya Pelayanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan • Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A
2	Tujuan: Membangun SDM Payakumbuh yang menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang handal, sehat dan kompetitif	2) Masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak		
3	Sasaran : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan	3) Masih rendahnya indeks		

No	Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi & Kebijakan RPJMD	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	pengendalian penduduk	pemberdayaan gender (IDG)	Penanganan Kasus KDRT	• Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak
4	Strategi : 1) Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 2) Peningkatan kualitas pelayanan KB dan ketahanan keluarga	4) Masih kurangnya keberpihakan pembangunan terhadap anak 5) Belum optimalnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik 6) Belum semua stakeholder memahami konsep PUG	disebabkan keterbatasan anggaran P2TP2A • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak • Masih rendahnya kualitas perlindungan anak	• Adanya lembaga masyarakat (PKK, P2TP2A, kader, dll) yang mendukung kinerja DP3AP2KB • Adanya <i>stakeholder</i> dan mitra kerja yang mendorong pelaksanaan Urusan Pemberdayaan
5	Kebijakan : 1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan hak	7) Belum semua OPD melaksanakan	anak Belum semua Kelurahan membentuk Forum Anak	• Adanya <i>stakeholder</i> dan mitra kerja yang mendorong pelaksanaan Urusan Pemberdayaan

No	Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi & Kebijakan RPJMD	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	<p>anak</p> <p>2. Meningkatkan Penanganan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan</p> <p>3. Meningkatkan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan</p> <p>4. Mewujudkan Payakumbuh Kota layak anak</p> <p>5. Meningkatkan kualitas layanan program keluarga berencana</p> <p>6. Menggerakkan</p>	<p>penyusunan perencanaan yang responsif gender (PPRG)</p> <p>8) Indeks Pembangunan Gender (IPG) sudah tinggi namun belum berada di kondisi ideal yang seharusnya 100% (seimbang antara IPM Laki-laki dengan IPM Perempuan)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan Tenaga Penyuluh (PLKB / PKB) untuk operasional di Lapangan 	<p>Perempuan, Perlindungan anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dengan adanya Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) yang diketuai oleh Kepala Bappeda merupakan peluang untuk menghadapi tantangan dalam Pengarusutamaan Gender. Hal ini dapat

No	Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi & Kebijakan RPJMD	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	dan memberdayakan seluruh masyarakat dalam program KB dan ketahanan keluarga			dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD)

3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN RENSTRA PROVINSI

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencanaturut mendukung pencapaian atas Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi. Adapun tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU):
Indeks Pembangunan Gender (IPG)

b. Meningkatkan capaian indeks pemberdayaan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Indeks
Pemberdayaan Gender (IDG)

2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

- 1) Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:
Pravelensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; dan
rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
- 2) Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan dibagi
jumlah perempuan di atas 18 tahun.

b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase
kabupaten/kota yang memberikan layanan komprehensif sesuai
standar kepada seluruh (100%) perempuan korban kekerasan.

3. Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:
Persentase kabupaten/kota Layak Anak

b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

- 1) Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar.
- 2) Persentase kabupaten/kota yang menindaklanjuti seluruh (100%) pengaduan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar.

c. Meningkatkan kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif sesuai dengan standar.

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi yang terkait dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah, dengan sasaran Meningkatnya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender.
2. Meningkatkan perlindungan terhadap hak perempuan, dengan sasaran: Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.
3. Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak anak, dengan sasaran: terimplementasikannya kabupaten/kota layak anak dan perlindungan khusus anak.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Dalam perencanaan Dokumen Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3A&P2KB) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 rencana program dan kegiatan yang mempunyai dampak Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya cakupan angka pemakaian kontrasepsi semua cara pada perempuan usia 15-49 tahun untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 65%.
2. Menurunnya prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan pada tahun 2019 (2013:20,48%).
3. Meningkatnya persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif pada tahun 2019 menjadi 70% (2015:50%).
4. Meningkatnya cakupan angka pemakaian kontrasepsi semua cara pada perempuan usia 15-49 tahun untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 65%.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dilakukan dengan menggunakan metode skoring dengan pembobotan.

Kriteria yang digunakan beserta bobot masing-masing kriteria disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Bobot Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No	Kriteria*)	Bobot**)
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi	20
2	Memiliki dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
3	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	15
4	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
5	Merupakan Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	30
	Total	100

Hasil scoring masing-masing permasalahan dalam rangka penentuan isu strategis disajikan pada Tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3
Tabel Skoring Dalam Penentuan Isu-isu Strategis

Permasalahan	Kriteria 1		Kriteria 2		Kriteria 3		Kriteria 4		Kriteria 5		Total	Rangking
	Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 30	Skor x Bobot	
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100	5	100	5	100	5	75	3	45	5	150	470	1
Indeks Pembangunan Gender (IPG) relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain atau dibawah rata-rata provinsi dan atau nasional	5	100	5	100	5	75	3	45	5	150	470	2
masih terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan	3	60	5	100	4	60	4	60	4	120	400	4
Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan dan anak	3	60	5	100	4	60	4	60	3	90	370	5
Masih tingginya angka Contraceptive Prevalence Rate (CPR) dibandingkan target CPR Propinsi dan Nasional	5	100	5	100	5	75	3	45	5	150	470	3
Meningkatkan cakupan pelayanan KKBPK	3	60	5	100	4	60	3	45	3	90	355	6

Berdasarkan hasil scoring ditetapkan isu strategis pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.
2. Indeks Pembangunan Gender (IPG). setiap tahun meningkat namun masih relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.
3. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan & anak dan jumlah kasus KDRT.
4. Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan dan anak.

5. Masih tingginya angka Contraceptive Prevalence Rate (CPR) dibandingkan target CPR Propinsi dan Nasional.

Berdasarkan permasalahan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana maka isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya peran dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan.
2. Belum optimalnya pencapaian kategori Kota Layak Anak.
3. Belum optimalnya peran dan kelembagaan perlindungan hak perempuan dan anak. Hal ini ditandai dengan belum optimalnya peran P2TP2A dalam melakukan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4. Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.
5. Belum optimalnya kualitas pelayanan Keluarga Berencana.
6. Belum optimalnya pelayanan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga KKBPK.

BAB IV
VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN

4.1 VISI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA

Untuk mendukung visi Kota Payakumbuh yakni **“PAYAKUMBUH MAJU, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT, DENGAN SEMANGAT KEBERSAMAAN MENUJU PAYAKUMBUH MENANG”**, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Kota Payakumbuh merumuskan visi sebagai berikut :

“ MEWUJUDKAN KELUARGA SEJAHTERA, KESETARAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN ANAK ”

4.2 MISIDINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA

Untuk mewujudkan visi **“ mewujudkan keluarga sejahtera, kesetaraan gender dan perlindungan anak ”** maka disusun misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan Kualitas hidup perempuan dengan partisipasi dan pemberdayaan serta mewujudkan pemenuhan hak anak yang berkeadilan berkelanjutan.**
- 2. Mewujudkan Keluarga Berencana yang sejahtera , berkualitas dan mandiri.**

4.3 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Kota Payakumbuh berdasarkan Misi DP3AP2KB adalah sebagai berikut :

1. TUJUAN PERTAMA : Meningkatkan Pemberdayaan serta Perlindungan Perempuan dan Anak.

(indikator tujuan : Indeks Pemberdayaan Gender (IDG))

Sasaran strategis :

1) Meningkatkan peran dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan.

Indikator sasaran :

- a) Indeks Pembangunan Gender (IPG)
- b) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
- c) Tingkat kategori capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)

2) Meningkatnya implementasi kota Layak Anak

Indikator sasaran :

- a) Tingkat kategori capaian Kota Layak Anak (KLA).

3) Menurunnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak

Indikator sasaran :

- a) Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap Perempuan.
- b) Persentase penurunan kekerasan terhadap anak.
- c) Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (termasuk TPPO).

2. TUJUAN KEDUA : Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk

indikator tujuan : laju pertumbuhan Penduduk

Sasaran strategis :

1) Meningkatnya kualitas pelayanan Keluarga Berencana.

Indikator sasaran :

- a) Contraceptive Prevalence Rate (CPR)/Prevelensi Pemakaian Kontrasepsi

2) Meningkatnyacakupan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)

Indikator sasaran:

- a) CakupanPelayanan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

3) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Indikator sasaran :

- a. Hasil penilaian AKIP oleh Inspektorat.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Jangka Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatkan pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Meningkatnya peran dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender/ IPG	98.52 (2015)	98.52	98.52	98.62	98.62	98.62
				Indeks Pemberdayaan Gender/ IDG	61.70 (2015)	61.76	61.8	61.86	61.92	62.5
			Meningkatnya implementasi Kota Layak Anak	Tingkat kategori capaian Anugerah Parahita Ekapraya/ APE		utama		utama		mentor
				Tingkat kategori capaian Kota Layak Anak/ KLA	pratama		madya		nindya	
			Menurunnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase kekerasan terhadap perempuan	0.10%	0.092%	0.074%	0.06%	0.055%	0.04%
				Persentase kekerasan terhadap anak	0.07014	0.0614	0.0526	0.0403	0.0351	0.0263
	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (termasuk TPPO)	95	95	95	100	100	100			
2	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	Meningkatkan kualitas pelayanan Keluarga Berencana	Contraceptive Prevalency Ratio (CPR)/Prevelensi pemakaian kontrasepsi	76.6%	76.8%	72.9%	77.0%	77.05%	77.1%
			Meningkatnya cakupan pelayanan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	cakupan pelayanan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	70.0%	74.0%	80.0%	83.0%	85.0%	90.0%
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Hasil penilaian AKIP oleh inspektorat	B	BB	BB	BB	A	A

4.4 Cross Cutting

Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh terdapat cross cutting dengan 5 (lima) indikator sasaran RPJMD (IKU) Kota Payakumbuh yaitu angka harapan hidup, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), nilai evaluasi AKIP Kota, Opini BPK, Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Tabel 4.2
Crosscutting Indikator Kota dengan Perangkat Daerah

INDIKATOR SASARAN RPJMD (IKU)KOTA	SASARAN DI PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
AngkaUsia Harapan Hidup	Meningkatnya kualitas pelayanan keluarga berencana	CPR	Program Keluarga Berencana	1. Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	2.771.622.769
				2. Pembinaan KB	56.740.000
				3. Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling (DAK fisik)	237.102.000
				4. Peningkatan Operasional KB (DAK non fisik)	1.269.630.769
	Meningkatnya	Meningkatnya	Program	Fasilitasi	1.208.150.000
					802.609.100

	kualitas pelaksanaan posyandu	kualitas pelaksanaan posyandu	Pengembangan Model Operasional BKB- Posyandu- PAUD	Penyelenggaraan PMT- AS dan Posyandu	
IDG (INDEKS PEMBERDAYAAN AAN GENDER)	Meningkatnya peran dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	IPG	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah	87.709.000
		Tingkat kategori capaian APE	Program Keserasian Kebijakan Kualita Anak dan Perempuan	Peningkatan peran perempuan di bidang politik dan lembaga legislatif	30.215.000
	Menurunnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusuteraan Gender dan Anak	P2TP2A	82.557.500
Nilai evaluasi AKIP Kota	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP perangkat daerah	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 3. Program Peningkatan		681.349.048 202.478.500 25.998.300

			Disiplin Aparatur		
			4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		11.214.400
			5. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan		88.815.000
			6. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak		625.012.920
			7. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan		87.709.000
			8. Program Peningkatan peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pemangunan		368.163.000
			9. Program KB		

			10. Program pelayanan kontrasepsi		2.771.622.769 29.183.500
			11. Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak		340.149.100
			12. Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PAUD		802.609.100
IKM	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah	Nilai IKM Perangkat daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	681.349.048 1.651.100 48.000.000 10.500.000

				4. Penyediaan jasa administrasi keuangan	161.088.000
				5. Penyediaan jasa kebersihan kantor	7.515.000
				6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	6.000.000
				7. Penyediaan ATK	20.261.000
				8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	13.099.750
				9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.875.000
				10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	7.500.000
				11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.821.550

				12. Penyediaan makanan dan minuman	8.857.500
				13. Rapat-rapat konsultasi ke luar daerah	120.590.000
				14. Penyediaan Tenaga Adminitrasi dan Teknis Perkantoran	269.590.248

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN
PENDUDUK KELUARGA BERENCANA

5.1 STRATEGI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA

Dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Kota Payakumbuh, maka usaha dan langkah – langkah yang akan dilakukan adalah dengan melaksanakan strategi-strategi dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas, antara lain :

Strategi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif.
2. Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang dan sistem pembangunan yang berbasis Pemenuhan Hak Anak (PHA).
4. Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap anak.

Strategi Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana

1. Peningkatan rata-rata usia kawin pertama perempuan melalui KIE.
2. Peningkatan kualitas pelayanan KIE.
3. Optimalisasi peran kelembagaan dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
4. Peningkatan kualitas program dan kegiatan Posyandu.

5.2 ARAH KEBIJAKAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA

Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Peningkatan peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang.
2. Peningkatan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, penyusunan PPRG dan pendampingan implementasi PPRG.
3. Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada penanganan wilayah.
4. Pemenuhan Hak Anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kota Layak Anak.
5. Peningkatan koordinasi dalam rangka percepatan implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus pada anak.
6. Penguatan dan peningkatan peran lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak dari berbagai kasus anak.

Kebijakan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana

1. Pengembangan sistem distribusi alkant sesuai kebutuhan masyarakat.
2. Pengembangan model ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dalam lima tahun mendatang, sesuai dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : Mewujudkan keluarga sejahtera, kesetaraan gender dan perlindungan anak				
VISI : Payakumbuh Maju, Sejahtera, dan Bermartabat, dengan Semangat Kebersamaan Menuju Payakumbuh Menang				
Misi : 1. Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Handal, Sehat, dan Kompetitif.				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak hak anak	Meningkatnya peran dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang	Peningkatan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dengan fokus pada : Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender; Penyusunan PPRG; dan Pendampingan Implementasi PPRG	
		Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender pada perangkat daerah melalui pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)	Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data gender terpilah	
		Meningkatkan pemberdayaan perempuan	Pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan dan hasil PUG di tingkat daerah	
	Meningkatnya implementasi Kota Layak Anak	Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak di daerah	Meningkatkan upaya pemenuhan hak anak	Penguatan lembaga/ jejaring Pengarus Utamaan Gender (PUG) di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi
				Optimalisasi program pemberdayaan perempuan
				Pemenuhan Hak Anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kota Layak Anak
				Penyusunan, review, harmonisasi dan pengoordinasian berbagai regulasi dan kebijakan Pemenuhan Hak Anak
				Peningkatan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak yang ramah anak
				Optimalisasi program perlindungan dan pemenuhan hak anak
				Pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak melalui pelembagaan Kota Layak Anak
Menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak	Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)		Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada penanganan wilayah on the spot	
			Peningkatan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum serta pemulangan dan reintegrasi sosial	
			Pemulihan perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan TPPO untuk reintegrasi sosial	
Misi : 2. Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Handal, Sehat, dan Kompetitif.				
Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk serta peningkatan kualitas keluarga	Meningkatkan kualitas pelayanan Keluarga Berencana	Meningkatkan rata-rata usia kawin pertama perempuan melalui KIE	Penyusunan kebijakan daerah dalam upaya pengendalian penduduk	
	Meningkatkan kualitas ketahanan keluarga	Meningkatkan kualitas pelayanan KB	Pengembangan sistem distribusi aikont sesuai kebutuhan masyarakat	
		Mengoptimalkan peran kelembagaan dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Pengembangan model kelembagaan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga	
		Meningkatkan standar pelayanan KB di masyarakat	Peningkatan ketahanan keluarga	
Mewujudkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Menerapkan sistem AKIP		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagaimana dihasilkan dari perumusannya. Adapun penyajiannya pada Lampiran I Renstra 2017-2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh.

		Pelayanan KIE			Jumlah pariwara program KB melalui radio spot baliho dan standing banner	Jenis pariwara	3	14.000.000			3	16.020.000	3	17.620.000	3	19.400.000	3	21.323.000	0	88.363.000	
		Peningkatan perlindungan hak reproduksi individu			Jumlah peserta PIK Remaja yang mengikuti pelatihan hak reproduksi individu	kelompok					29	21.300.000	29	25.600.000	29	28.200.000	29	28.200.000	87	75.100.000	
		Peningkatan sarana dan prasana keluarga Berencana			Pembinaan KB kepada calon akseptor KB oleh kader KB	bulan	12	230.000.000	12	237.102.000	12	245.292.000	12	269.820.000	12	296.823.000	12	326.482.500	60	1.605.519.500	
		Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling			Jumlah pembayaran honor Kader KB	orang	280			280	280		280		280		280		1.120	-	
		Peningkatan Operasional Keluarga Berencana			Jumlah pengadaan peralatan alat-alat kedokteran kebidanan dan kebutuhan sarana-prasarana program KB lainnya	jenis															
		Pengembangan Model Parameter Kependudukan			Jumlah pengadaan peralatan alat-alat kedokteran kebidanan dan kebutuhan sarana-prasarana program KB lainnya	jenis	4	1.100.000.000	4	332.707.800	6	850.000.000	8	919.420.136	8	1.046.007.650	8	1.100.000.000	30	5.348.135.586	
		Program Pelayanan Kontrasepsi		Meningkatkannya kualitas pelayanan kontrasepsi	Cakupan Peserta KB Aktif	Persen	76.36	76.57	-	76.59	-	76.61	95.000.000	76.64	104.500.000	76.7	114.950.000	77	126.445.000	77	440.895.000
		Program Kesehatan Reproduksi		Meningkatkannya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi	Rata-rata Usia Perkawinan	Tahun	21	21	-	21.70	-	22.10	132.185.000	22.30	145.403.500	22.40	159.943.850	22.50	175.938.235	22.50	613.470.585
		Program Pengembangan Pusat Informasi dan Konseling KRR		Meningkatkannya kualitas pengembangan pusat informasi dan konseling KRR	Jumlah Kelompok PIK- Remaja sekolah dan luar sekolah yang aktif	kelompok	27	27	-	27	-	27	69.000.000	28	38.000.000	29	40.000.000	30	42.000.000	30	189.000.000
		Meningkatnya cakupan pelayanan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)		Meningkatnya cakupan pelayanan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	Persentase BKB Aktif	persen	100	100	373.998.500	100	373.998.500	100	305.009.100	100	335.510.010	100	369.061.011	100	405.967.112	100	2.163.544.233
		Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak		Meningkatnya kualitas tenaga pendamping bina keluarga	Persentase UPPKS Aktif	persen	50	50	-	50	-	51	80.500.000	52	85.600.000	53	90.960.000	54	96.606.000	54	353.666.000
		Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga		Meningkatnya kualitas kelembagaan Posyandu dengan strata mandiri	Persentase BKL Aktif	persen	70	70	70	70	75	80	80	80	81	81	83	83	83	83	
		Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD		Meningkatnya kualitas kelembagaan Posyandu dengan strata mandiri	Persentase BKB Aktif	kelompok	0		9	14	19	41.000.000	24	56.000.000	29	58.000.000	29	58.000.000	95	155.000.000	
						orang	380	373.998.500	380	373.998.500	380	305.009.100	380	294.510.010	380	313.061.011	380	347.967.112		2.008.544.233	
						kelompok	0		9	14	19	41.000.000	24	56.000.000	29	58.000.000	29	58.000.000	95	155.000.000	
						orang	0				80.500.000	141	85.600.000	152	90.960.000	163	96.606.000	163	96.606.000	456	353.666.000
						persen	70	70	70	75	80	80	80	81	81	83	83	83	83	83	
						kelompok															
						persen	57	59	766.090.000	65	832.621.600	70	915.883.760	75	1.007.472.136	80	1.108.219.350	85	1.219.041.285	85	5.849.328.131
						kader	660	766.090.000	660	832.621.600	660	915.883.760	660	1.007.472.136	660	1.108.219.350	660	1.219.041.285	3300	5.849.328.131	

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian AKIP oleh Inspektorat	Program Pelayanan Administrasi Surat Perkantoran	Meningkatnya nilai IKM dan evaluasi AKIP oleh inspektorat	Nilai IKM	Jumlah sekolah penerima PMT-AS	sekolah	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				
					Nilai	79,95	81	528.551.736	84	531.830.624	87	589.585.125	89	651.543.638	90	714.198.001	91	783.117.801	91	783.117.801	91	3.798.826.925		
					Penyediaan Jasa Administrasi Surat Menyurat	Jumlah benda pos yang dibeli	materai	296	1.230.000	296	1.287.780	296	1.426.475	296	1.569.122	296	1.726.036	296	1.898.637	296	1.898.637	296	9.138.050	
						Jumlah buku cek yang dibeli	cek giro	5		5		5		5		5		5		5		5		
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa kantor yang dibayarkan	rekening per bulan	3	34.250.000	3	37.440.000	3	41.472.288	3	45.619.517	3	50.181.468	3	55.199.615	3	55.199.615	3	264.162.888	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas atau operasional yang dibayarkan pajaknya	unit	51	8.100.000	51 unit	8.190.000	51	9.072.063	51	9.979.269	51	10.977.196	51	12.074.916	51	12.074.916	51	58.393.444	
					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pengelola administrasi keuangan yang dibayarkan jasa nya dan pengelola barang milik daerah	orang	38	124.030.000	38 orang	126.027.007	38	139.600.115	38	153.560.127	38	168.916.140	38	185.807.754	38	185.807.754	38	897.941.143	
					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bahan bahan kebersihan kantor yang dibeli	jenis	24	4.681.700	24 jenis	5.861.700	24	6.493.005	24	7.142.306	24	7.856.536	24	8.642.190	24	8.642.190	24	40.677.437	
					Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	unit	17	4.260.000	17 unit	4.680.000	17	5.184.036	17	5.702.440	17	6.272.684	17	6.899.952	17	6.899.952	17	32.999.112	
					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	Jenis	42	16.308.000	42 jenis	15.803.580	42	17.505.626	42	19.256.188	42	21.181.807	42	23.299.988	42	23.299.988	42	113.355.189	
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak	Jenis	8	9.172.805	8 jenis, 44.000 lembar, 60 jilid	10.217.805	8	11.318.263	8	12.450.089	8	13.695.098	8	15.064.608	8	15.064.608	8	71.918.668	
						Jumlah dokumen yang digandakan	Lembar	44000																
						Jumlah dokumen yang dijilid	buku	60																
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	jenis	8	2.024.000	8 jenis	2.242.500	8	2.484.017	8	2.732.419	8	3.005.661	8	3.306.227	8	3.306.227	8	15.794.824	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan kerja dan perlengkapan kantor	unit	4	5.180.000	4 paket	5.850.000	4	6.480.045	4	7.128.050	4	7.840.854	4	8.624.940	4	8.624.940	4	41.103.889	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	jenis	2	2.508.000	2 jenis	2.980.809	2	3.301.842	2	3.632.026	2	3.995.229	2	4.394.752	2	4.394.752	2	20.812.658	
					Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah porsi makanan dan snack yang disediakan dalam rapat	porsi	681	6.298.000	681 porsi	6.908.850	681	7.652.933	681	8.418.226	681	9.260.049	681	10.186.054	681	10.186.054	681	48.724.112	
					Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang dilaksanakan	kali	75	111.689.231	75 kali dan 16 kali	94.060.200	75	104.666.825	75	115.133.508	75	126.646.858	75	139.311.544	75	139.311.544	75	691.508.166	
						Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilaksanakan	kali	16																
					Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga administrasi perkantoran yang dibayarkan honorrya	orang	10	198.820.000	10 orang	210.280.393	10	232.927.592	10	259.220.351	10	282.642.385	10	308.406.624	10	308.406.624	10	1.492.297.345	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kualitas	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik	Persentase	80	80	200.098.500	80	200.098.500	80	395.108.350	80	324.619.185	80	357.081.103	80	392.789.214	80	1.869.794.852						
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 dan 4	unit	51	176.498.500	51 unit	180.338.500	51	181.170.500	51	149.627.979	51	150.888.110	51	183.776.920	51	183.776.920	51	1.022.300.509					
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	unit							140.000.000		168.000.000		170.000.000		170.000.000		478.000.000						
	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	buah	1	11.800.000	1 paket	9.880.000	1	33.937.850	1	17.495.603	1	19.096.526	1	21.012.294	1	21.012.294	1	113.222.273					
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung yang dilakukan pemeliharaan	unit	1	11.800.000	1 unit	9.880.000	1	180.000.000	1	17.495.603	1	19.096.467	1	18.000.000	1	18.000.000	1	256.272.070					
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya kualitas Disiplin Aparatur	Persentase ASN bernakal dinas	Persentase	100	100	24.240.000	100	25.998.300	100	28.420.000	100	31.262.000	100	34.388.200	100	37.827.020	100	182.135.520						
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapan yang diadakan	stel pakaian	54	24.240.000	54 stel	25.998.300	54	28.420.000	54	31.262.000	54	34.388.200	54	37.827.020	54	37.827.020	54	182.135.520					

		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD		Meningkatnya kualitas Kapasitas Sumber	Jumlah PKB yang meningkat		Orang	0	0	4.450.000	1	4.450.000	1	4.895.000	1	5.384.500	1	5.922.950	1	6.515.245	9	31.617.695
			Penilaian Angka Kredit		Jumlah PKB yang dinilai angka kreditnya		orang	0	0	4.450.000	1	4.450.000	1	4.895.000	1	5.384.500	1	5.922.950	1	6.515.245	5	31.617.695
		Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Meningkatnya kualitas Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat		Nilai	CC	B	51.417.900	BB	51.414.400	A	56.555.840	A	62.211.424	A	68.432.566	A	75.275.823	A	365.307.953
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun		Laporan	2	17.202.900	2	14.295.726	2	15.582.340	2	17.550.310	2	20.855.351	2	20.855.350	2	106.341.977	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik yang disusun		Dokumen	2	15.715.000	2	16.517.964	2	18.004.580	2	19.624.993	2	23.992.116	2	23.992.116	2	117.846.769	
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan yang dilakukan		kali	12	18.500.000	12 kali	20.600.710	12	22.968.920	12	25.036.121	12	23.585.099	12	30.428.357	12	141.119.207	
		J U M L A H										4.750.844.624		6.398.212.685		6.968.233.905		7.409.182.158		8.168.648.729		38.463.899.234

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja DP3A&P2KB yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Pemberdayaan Gender/ IDG (IKU)	61.70 (2015)	61.70 (2015)	61,76	61,8	61,86	61,92	61,92
2	Indeks Pembangunan	98.52 (2015)	98.52 (2015)	98,52	98,52	98,62	98,62	98,62

	Gender/ IPG (IKD)							
3	Tingkat kategori capaian Anugerah Parahita Ekapraya/ APE (IKD)	Tidak ada penilaian	utama	utama	utama	mentor	mentor	mentor
4	Tingkat kategori capaian Kota Layak Anak/ KLA (IKD)	pratama	pratama	pratama	madya	madya	nindya	Utama
5	Jumlah kebijakan terkait hak dan perlindungan anak (IKD)	1	-	1	1	1	2	2
6	Persentase kekerasan terhadap perempuan (IKD)	0.110%	0.100%	0.092%	0.074%	0.060%	0.040%	0.040%
7	Persentase kekerasan terhadap anak (IKD)	0,075	0,070	0,061	0,052	0,040	0,035	0,026
8	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (IKD)	95	95	95	95	100	100	100
9	CPR (IKD)	70,9%	71,3%	72,4%	73,5%	74,9%	76,0%	73,5%
10	CAKUPAN KKBPK (IKD)	70,0%	74,0%	80,0%	83,0%	85,0%	90,0%	83,0%
11	Hasil penilaian AKIP oleh inspektorat	B	BB	BB	A	A	A	A
12	Persentase perempuan yang duduk di legislatif	8%	8%	8%	10%	10%	10%	15%

BAB VIII

PENUTUP

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Perangkat OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Tahun 2017-2022 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan, maka Renstra Tahun 2017–2022 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RENJA Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana setiap tahun dalam kurun waktu tersebut, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Payakumbuh Tahun 2005 – 2025.

Keberhasilan secara strategi sangat tergantung kepada rencana dan pelaksanaan kerja tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana. Oleh karena itu perlu disusun rencana kerja tahunan yang berdasarkan skala prioritas dan berkesinambungan serta dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan mengacu kepada aturan- aturan yang berlaku . Rencana Strategis dan Rencana kerja tahunan dapat dijadikan bahan evaluasi pelaksanaan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana tahun 2017- 2022 melalui laporan kinerja tahunan dan laporan kinerja lima tahunan (evaluasi rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.

Dengan tersusunnya dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana tahun 2017- 2022 ini, diharapkan segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan menjadi terarah sehingga dapat mewujudkan visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan

Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana khususnya Visi dan Misi Kota Payakumbuh pada umumnya.

Semoga Rencana Strategis DP3AP2KB Kota Payakumbuh Tahun 2017- 2022 ini dapat memberikan sumbangsih nyata bagi Pemerintah Kota Payakumbuh terkait dalam menetapkan kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan di Kota Payakumbuh.

Payakumbuh, Maret 2018

**KEPALA DP3AP2KB KOTA
PAYAKUMBUH**



Drs. SYAHNADEL KHAIRI
NIP.19610903 198703 1 003

SASARAN 1 :
Meningkatnya Peran dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan

INDIKATOR KINERJA 1 :
 IK. 1.1 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
 IK. 1.2 Indeks Pembangunan Gender (IPG)
 IK. 1.3 Tingkat kategori Capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)

SS 1.1 :
 Meningkatnya keterwakilan perempuan di pemerintahan

IK 1.1 :
 Persentase perempuan yang duduk di legislatif
 IK 1.2 :
 Persentase partisipasi perempuan di Lembaga Eksekutif

SS 1.1.1 :
 Meningkatnya partisipasi perempuan dalam organisasi

IK 1.1.1.1 :
 Jumlah PKK aktif
 IK 1.1.1.2 :
 Jumlah organisasi perempuan yang aktif
 IK 1.1.1.3 :
 Jumlah perempuan yang memahami pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum dan sosial
 IK 1.1.1.4 :
 Jumlah perempuan yang berpartisipasi dalam Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI)
 IK.1.1.1.5
 Jumlah organisasi perempuan yang dibina

SS. 1.1.2
 Meningkatnya partisipasi perempuan di pemerintahan

IK.1.1.2
 Jumlah asn perempuan yang menduduki jabatan struktural

SS 1.1.1.1
 Terlaksananya Pembinaan Organisasi Perempuan
 IK 1.1.1.5.1
 Jumlah dokumen monitoring Organisasi Perempuan

SS 1.1.1.1
 Terlaksananya Pelaksanaan PKK
 IK 1.1.1.1
 Jumlah dokumen monitoring pembinaan PKK

SS 1.2 :
 Meningkatnya peran perempuan dalam menunjang kesejahteraan keluarga

IK 1.2 :
 Persentase pelaku usaha ekonomi perempuan

SS 1.2.1 :
 Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pengembangan diri

IK 1.2.1.1 :
 Persentase perempuan inspiratif yang menginspirasi Perempuan lain dalam pengembangan diri
 IK 1.2.1.2 :
 Persentase perempuan yang memahami konsep pengembangan potensi perempuan
 IK 1.2.1.3 :
 Jumlah jenis kreasi / inovasi rangkaian peringatan Hari Ibu
 IK 1.2.1.4 :
 Jumlah peserta lomba perempuan inspiratif

SS.1.2.2 :
 Meningkatnya pendapatan perempuan di bidang ekonomi

IK.1.2.2 :
 Persentase perempuan pelaku usaha yang berpartisipasi dalam event perempuan

SS 1.2.1.1
 Terlaksananya kegiatan Perempuan Inspiratif
 IK 1.2.1.1
 Jumlah dokumen monitoring perempuan inspiratif

SS 1.2.2.1
 Terlaksananya dokumentasi pelaku usaha dalam event perempuan
 IK 1.2.2.1
 Jumlah dokumen monitoring pelaku usaha perempuan dalam event perempuan

SS 1.3:
 Meningkatnya Peran kelembagaan dalam percepatan pengarusutamaan gender (PUG)

IK 1.3.1 :
 Jumlah kelembagaan PUG yang aktif
 IK 1.3.2 :
 Persentase program dan kegiatan yang di PPRG kan

SS 1.3.1
 Meningkatnya kualitas perencanaan yang responsif gender

IK 1.3.1.1
 Persentase ASN yang memahami PPRG
 IK 1.3.1.2
 Persentase pemenuhan dokumen untuk evaluasi PUG
 IK 1.3.1.3
 Persentase OPD yang telah menyusun ARG
 IK 1.3.1.4 :
 Jumlah peserta pelatihan PPRG yang mengikuti bimbingan dan pelatihan PPRG

SS 1.3.2:
 Meningkatnya pembinaan kelembagaan PUG

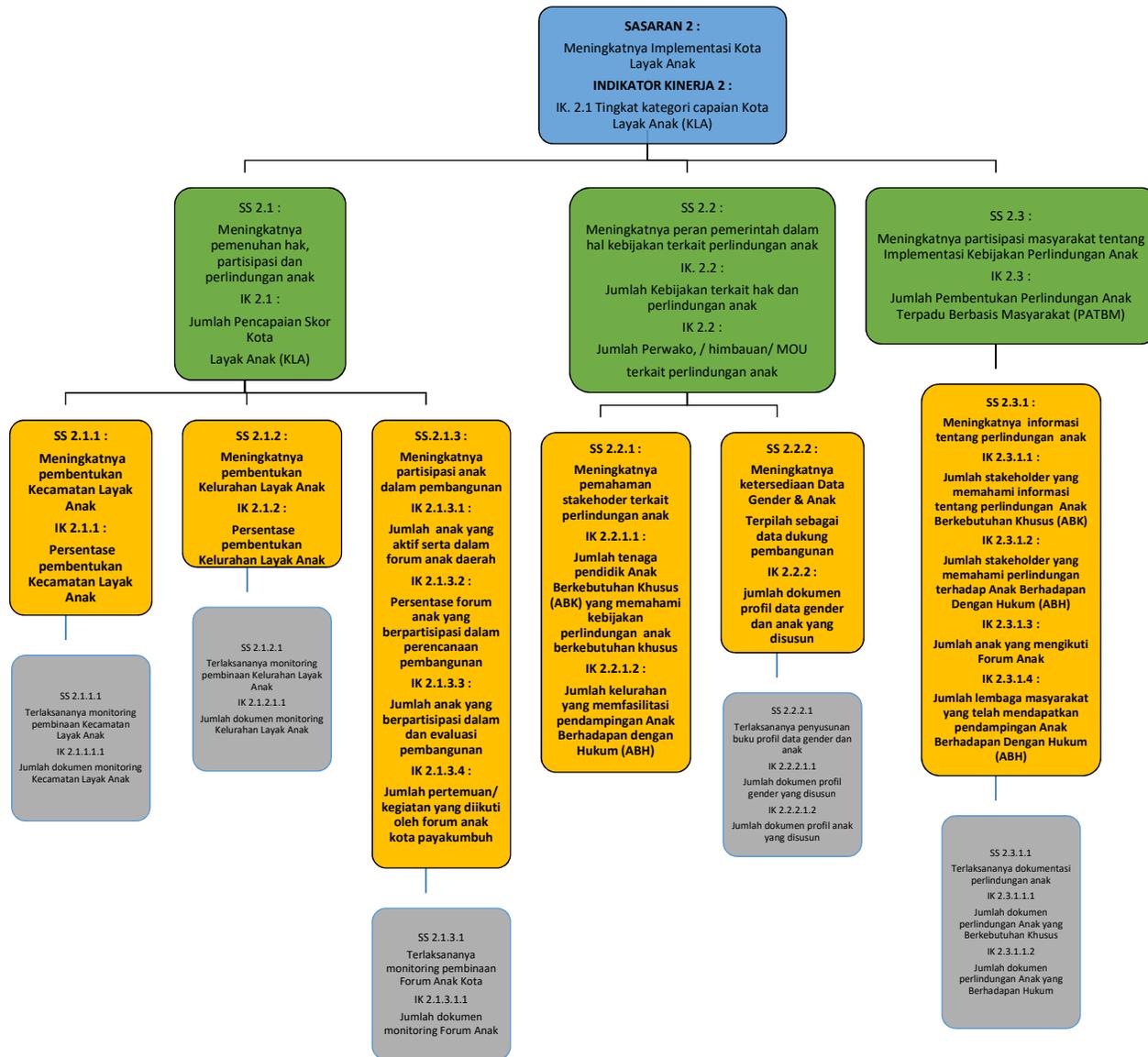
IK 1.3.2 :
 Persentase pokja PUG yang mendapat pembinaan

SS 1.3.2.1
 Terlaksananya pembinaan kelembagaan PUG
 IK 1.3.2.1
 Jumlah dokumen pembinaan pokja PUG

SS 1.3.1.1.
 Terlaksananya dokumentasi PPRG
 IK 1.3.1.1
 Jumlah dokumentasi dokumen PPRG

SS 1.3.1.2
 Terlaksananya advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan
 IK 1.3.1.2.1
 Jumlah dokumen ARG
 IK 1.3.1.2.2
 Jumlah dokumen evaluasi PUG

SS 1.3.1.3
 Terlaksananya bimbingan dan pelatihan PPRG
 IK 1.3.1.3
 Jumlah peserta PPRG yang mengikuti bimbingan dan pelatihan PPRG



SASARAN 3 :
Menurunnya Angka Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
INDIKATOR KINERJA 3 :
IK. 3.1 Persentase Kekerasan Terhadap Perempuan
IK. 3.2 Persentase Kekerasan Terhadap Anak
IK. 3 Persentase Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak(termasuk TPPO)

SS 3.1.1 :
Meningkatnya Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan
IK 3.1.1 :
Persentase Penanganan Kekerasan terhadap perempuan

SS 3.1.2 :
Meningkatnya Penanganan Kekerasan Terhadap Anak
IK 3.1.2 :
Persentase Penanganan Kekerasan terhadap anak

SS 3.1.1.1 : Meningkatnya fasilitasi penanganan kasus kekerasan perempuan di P2TP2A
IK 3.1.1.1 : Jumlah penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan

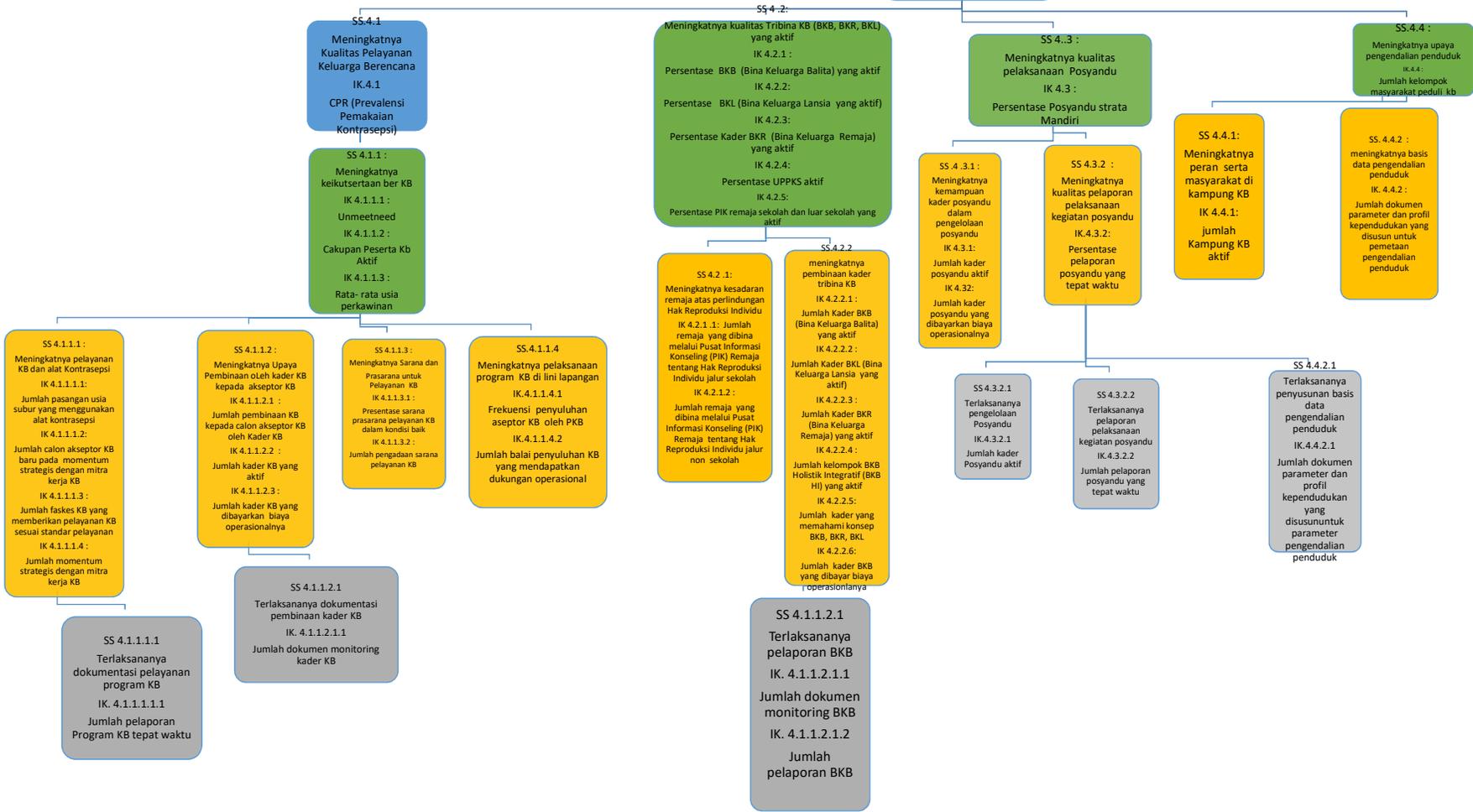
SS 3.1.2.1 :
Meningkatnya fasilitasi penanganan kasus kekerasan anak di P2TP2A
IK 3.1.2.1 :
Jumlah penanganan kasus kekerasan terhadap anak

SS 3.1.1.1.1
Terlaksananya fasilitasi Penanganan kasus kekerasan perempuan di P2TP2A
IK 3.1.1.1.1
Jumlah dokumen Penanganan kasus kekerasan perempuan

SS 3.1.2.1.1
Terlaksananya fasilitasi Penanganan kasus kekerasan perempuan di P2TP2A
IK 3.1.1.1.1
Jumlah dokumen Penanganan kasus kekerasan anak

SASARAN 4 :
Meningkatnya Cakupan Pelayanan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPk)

INDIKATOR KINERJA 4 :
Cakupan Pelayanan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPk)



SASARAN 5 :
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
INDIKATOR KINERJA 5 :
Hasil penilaian AKIP oleh Inspektorat

